

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi tahun kalender (Januari s/d Desember 2021) Provinsi Kepri (Gabungan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) adalah sebesar 2,26 persen (ytd) atau (yoy). Perkembangan inflasi Nasional, Provinsi Kepri, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dari Januari s/d Desember 2021 (mtm) sebagai berikut : PROVINSI/ KOTA : JAN: PEB: MAR: APR: MEI: JUN: JUL: AGS: SEP: OKT: NOV: DES: 1. Provinsi Kepri : 0,67: -0,60: -0,07: 0,09: 0,24: -0,13: 0,43: -0,42: 0,31: 0,30: 0,86: 0,56 2. Kota Batam : 0,68: -0,60: -0,02: 0,15: 0,26: -0,15: 0,45: -0,44: 0,33: 0,32: 0,86: 0,58 3. Kota Tanjungpinang : 0,56: -0,59: -0,42: -0,36: 0,03: -0,02: 0,36: -0,32: 0,19: 0,16: 0,85: 0,42 4. Nasional : 0,26: 0,10: 0,08: 0,13: 0,32: -0,16: 0,08: 0,03: -0,04: 0,12: 0,37: 0,57 Selama triwulan IV tahun 2021, Kepri mengalami inflasi. Kelompok Transportasi dan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar dalam pergerakan angka inflasi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2021. Pergerakan inflasi triwulan IV dikarenakan adanya kelonggaran aturan penanganan pandemi Covid-19 sehingga aktifitas dan mobilitas masyarakat mulai meningkat. Selain itu adanya momentum menjelang Natal dan Tahun Baru serta Musim Angin Utara sehingga permintaan barang dan jasa menjadi meningkat juga. Perkembangan inflasi triwulan IV dapat dilihat dari bulan Oktober - Desember 2021. Pada bulan Oktober 2021, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,30%. Ada 3 komoditas yang menyumbang inflasi teratas dibulan tersebut yaitu : a. Cabai Merah : 0,1819 % b. Angkutan Udara : 0,1754 % c. Minyak Goreng : 0,1341 % Pada bulan November 2021, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,86% dan 3 komoditas yang menyumbang inflasi teratas dibulan November yaitu : a. Cabai Merah : 0,2137 % b. Minyak Goreng : 0,1290 % c. Telur Ayam Ras : 0,1152 % Sedangkan pada bulan Desember 2021, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,56% dan 3 komoditas yang menyumbang inflasi teratas dibulan Desember yaitu : a. Angkutan Udara : 0,1938% b. Minyak Goreng : 0,1513 % c. Cabai Merah : 0,1065 % Inflasi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan IV tahun 2021 lebih rendah dari sasaran inflasi yang telah ditetapkan Provinsi Kepulauan Riau, namun upaya pengendalian inflasi masih terus dilakukan terutama dalam rangka memastikan ketersediaan barang di pasar dan menjaga kelancaran pasokan serta distribusi barang terutama disaat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru serta Musim Angin Utara mengingat Kepri sangat tergantung pada daerah lain.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Target inflasi Provinsi Kepri berdasarkan RPJMD Provinsi Kepri tahun 2016 - 2021 yaitu untuk tahun 2021 adalah sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy), dan target inflasi Nasional tahun 2021 adalah sebesar 3 ± 1 persen (yoy). Apabila target inflasi tersebut dirata - rata maka dalam 12 bulan berarti inflasi yang sesuai target harus berada dalam rentang 2,50 sampai dengan 4,50 persen. Kondisi riil inflasi Provinsi Kepri (Gabungan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) Januari - Desember 2021 adalah sebesar 2,26 persen (ytd atau yoy). Hal ini menandakan bahwa inflasi Kepri telah berada didalam target inflasi Provinsi Kepri berdasarkan RPJMD Provinsi Kepri tahun 2016 - 2021, dan sasaran inflasi nasional. Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV tahun 2021 antara lain : 1. Adanya peningkatan permintaan pada momentum HBKN yaitu Natal dan Tahun Baru. 2. Adanya Musim Angin Utara di akhir sampai dengan awal tahun yang dapat menyebabkan gelombang laut tinggi sehingga aktifitas nelayan dan penyeberangan laut menurun. 3. Meningkatnya aktifitas masyarakat seiring menurunnya jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19, sehingga adanya kelonggaran aturan penanganan Covid-19. 4. Cuaca yang kurang kondusif (musim hujan/banjir/bencana lain) di daerah sentra produsen yang berdampak pada keterbatasan

pasokan dan hasil panen. 5. Kurangnya partisipasi BUMD di Kepulauan Riau untuk ikut dalam stabilitas harga pangan di Kepulauan Riau.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV tahun 2021 masih difokuskan pada menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan pokok ditengah pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan di triwulan IV ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut : 1. Melaksanakan Capacity Building TPID se-Kepulauan Riau Tahun 2021 melalui tatap muka dan daring/video conference dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Ekonomi melalui Optimalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan pada tanggal 11 Oktober 2021. 2. Melaksanakan Capacity Building TPID se-Kepulauan Riau II Tahun 2021 melalui daring/video conference dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Teknis Penyusunan Laporan Rutin TPID pada tanggal 23 November 2021. 3. Melaksanakan rapat koordinasi High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri melalui tatap muka dan daring/video conference guna membahas langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru serta Musim Angin Utara pada tanggal 03 November 2021. Kemudian pada rapat tersebut kepada kepala daerah kabupaten/kota dan instansi terkait se-Kepulauan Riau diharapkan: a. Tetap fokus melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap : 1) Stok/pasokan bahan pangan pokok strategis terutama minyak goreng, daging ayam ras, beras dan kedelai; 2) Harga bahan pangan pokok strategis terutama yang diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah; dan 3) Keamanan produk pangan segar dan produk pangan olahan. b. Pengawasan untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi. c. Melakukan operasi pasar jika diperlukan. d. Memonitor dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara untuk keamanan dan kelancaran distribusi serta memprioritaskan kegiatan bongkar muat terutama bahan pangan pokok strategis. e. Melakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Untuk itu agar dapat menyampaikan melalui media cetak dan media elektronik tentang : 1) Perkembangan stok bahan pangan pokok strategis yang terkendali; 2) Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian bahan pangan pokok strategis; 3) Menghimbau masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok sesuai kebutuhan; 4) Menghimbau masyarakat mengkonsumsi ikan air tawar saat produksi ikan laut berkurang di musim angin utara. f. Mencermati dampak fenomena La Nina yang akan terjadi di daerah penghasil komoditas bahan pokok sehingga dapat mengambil langkah antisipatif jika terjadi gangguan. g. Mendukung implementasi berbagai program Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau dalam penciptaan ekosistem stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat akibat dampak Covid-19 antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, termasuk bantuan Sosial Produktif untuk bantuan modal UMKM dan lain-lain. h. Berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, apabila terdapat bahan pangan pokok strategis yang diprediksikan mengalami kekurangan dalam menjelang Natal dan Tahun Baru serta musim angin utara. i. Mengevaluasi dan menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi pengendalian inflasi untuk tahun 2022 - 2024 yang disinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar capaian inflasi berada pada sasaran yang ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024. j. Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan memperhatikan ketersediaan pasokan bahan pangan selama Musim Angin Utara dari bulan November 2020 hingga Januari 2021. k. Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat sedini

mungkin menyiapkan mitigasi untuk potensi bencana hidrometeorologi terkait tingginya intensitas curah hujan pada bulan November 2021 – Januari 2022 di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya. l. Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan dapat menggesa BUP Karimun sebagai pengelola untuk perbaikan pelabuhan RoRo di Selat Belia agar kegiatan bongkar muat orang dan kendaraan menjadi lancar. m. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mereview kembali efektifitas dan efisiensi rute-rute tol laut di Kepulauan Riau dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota. n. Meningkatkan peran dan memperluas jaringan Pasar Tani dalam menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan berkualitas untuk meningkatkan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. o. KPPU Kanwil I diharapkan mengawasi terjadinya lonjakan harga komoditi, khususnya sektor pangan karena kelangkaan produksi dan pasokan, atau karena perilaku dari pelaku usaha yang bersepakat menahan pasokan (kartel). 4. Mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi tahun 2021 dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Inflasi dan Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Peran Digitalisasi UMKM pada tanggal 28 Oktober 2021. 5. Mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Se-Sumatera tahun 2021 dengan tema Sinergi Pengendalian Inflasi melalui Implementasi Kerjasama Antar Daerah dan Adopsi Digital pada tanggal 03 Desember 2021. 6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pasar murah dalam rangka HBKN Nataru yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kepri, Bulog, distributor dan pasar ritel di Tanjungpinang pada tanggal 16 – 18 Desember 2021. 7. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan peran BUMD dalam mengendalikan inflasi daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri, yaitu : 1. Aktifitas petugas pengawasan dan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok untuk turun ke lapangan terkadang terhambat dikarenakan adanya pembatasan mobilitas dan pemangkasan anggaran untuk monitoring. 2. Karena Provinsi Kepri merupakan wilayah kepulauan, maka peranan kapal Ro-Ro sangat penting untuk mengangkut bahan komoditas hasil pertanian dan sembako. Melalui kapal Ro-Ro, barang yang diangkut dapat dalam jumlah besar, sehingga lebih efisien. Pada saat ini beberapa komoditas hasil pertanian (seperti cabe, tomat, brokoli dll) diangkut dengan pesawat terbang yang berbiaya mahal, karena kalau diangkut melalui kapal dikhawatirkan busuk karena lamanya proses pengangkutan. Untuk itu perlu ada kebijakan untuk memperlancar proses pengangkutan tersebut seperti memprioritaskan bongkar muat komoditas hasil pertanian terlebih dahulu dibanding barang lain, adanya diskon tarif angkutan untuk muatan hasil pertanian dan sebagainya. 3. Perlu meningkatkan ketersediaan data produksi/stock dan harga komoditas pangan ter-update secara mingguan dalam rangka mempercepat aksi atau tindak lanjut pengambilan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan pangan. 4. Perlu mengidentifikasi sarana-sarana distribusi atau lainnya yang dibutuhkan dalam peningkatan peran BUMD terkait pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri sebagaimana diuraikan pada angka IV tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kepri merekomendasi beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut : 1. Diharapkan ada kebijakan PT. ASDP untuk menjadikan prioritas proses bongkar muat bahan komoditas hasil pertanian yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dan adanya penetapan tarif kapal Ro-Ro yang lebih rendah untuk mobil pick-up atau lori/truk yang mengangkut kebutuhan pokok dan hasil pertanian; 2. Dalam penanganan Covid-19 untuk menggerakkan roda

perekonomian khususnya pada pedagang di pasar mengingat banyaknya aktifitas massa ditempat tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah untuk : a. Melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pedagang di pasar. b. Mendorong implementasi transaksi secara non-tunai, seperti penggunaan sistem barcode (QRIS) dan sebagainya. 3. Pemerintah Pusat diharapkan mendorong dan memberikan kemudahan transformasi digital terutama bagi UMKM dan pelaku usaha yang kesulitan beradaptasi dengan program transformasi digital tersebut. 4. Perlunya ada Kantor Perwakilan Distributor Pupuk di Provinsi Kepulauan Riau sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan lancar sampai ke petani; 5. Mendorong berbagai instansi vertikal, dan dinas-dinas di Pemprov Kepri untuk terus menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial terkait pandemi Covid-19 yang masih mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.